

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Daerah di Indonesia dibagi ke dalam beberapa provinsi, kabupaten dan juga kota dengan latar belakang budaya dan sumber daya alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Pada tahun 1999 lahir Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah direvisi menjadi Undang-undang No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah merupakan pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusannya. Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya, seperti dalam fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan, dan fungsi perlindungan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah juga dipengaruhi oleh sumber daya yang ada di daerah tersebut. Baik sumber daya manusia, maupun sumber daya seperti letak geografis, kondisi ekonomi suatu daerah, juga besaran penduduk yang ada di daerah tersebut.

Karena beberapa faktor tersebut maka pendapatan asli daerah dari masing-masing daerah di Indonesia dapat berbeda-beda besarnya.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masing-masing besarnya ditentukan oleh kebijakan dari pemerintah pusat. Dana perimbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian ditransfer kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dan menjalankan program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Sumber keuangan daerah lainnya juga dapat berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti dana hibah, dana darurat dan pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di Indonesia. Sesuai dengan tujuan otonomi daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Semakin tinggi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana perimbangan maka akan semakin tinggi tingkat

kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan yang ada di daerahnya. Di bawah ini merupakan tabel mengenai jumlah pendapatan daerah di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017-2021 :

Tabel 1. 1 Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Dana Lain-lain	Total Pendapatan	Ket
2017	Rp 1.650.616.728.824	Rp 1.897.380.026.000	Rp 717.340.273.580	Rp 4.265.337.028.404	1,45%
2018	Rp 2.872.568.512.687	Rp 1.999.860.577.217	Rp 610.681.324.087	Rp 5.483.110.413.991	28,55%
2019	Rp 2.812.933.124.762	Rp 2.027.537.676.764	Rp 1.003.201.844.755	Rp 5.843.672.646.281	6,58%
2020	Rp 2.465.364.759.567	Rp 1.701.756.758.490	Rp 1.116.137.782.680	Rp 5.283.259.300.737	-9,59%
2021	Rp 2.869.928.724.492	Rp 2.970.840.235.913	Rp 308.374.669.000	Rp 6.149.143.629.405	16,39%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Data diolah peneliti)

Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang mulai mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Meskipun demikian jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang masih di bawah jumlah pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah di Kabupaten Tangerang masih memiliki ketergantungan terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pendapatan lainnya.

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, semua penerimaan daerah dianggarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan dan program kerja pemerintah daerah pada tahun tertentu yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi belanja daerah memiliki peranan penting dalam stabilitas ekonomi daerah. Permasalahan yang sering

muncul dalam pengalokasian belanja daerah yaitu anggaran belanja yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Anggaran yang minim dan inefisiensi dalam pengalokasian belanja daerah mengakibatkan kurangnya anggaran yang tersedia bagi pembangunan daerah. Begitu juga yang terjadi pada pengalokasi anggaran belanja di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 belanja daerah Kabupaten Tangerang sebesar 5.833.698.944.394 dengan rincian belanja operasi sebesar 3.859.610.157.225, belanja modal sebesar 1.245.790.580.493, belanja tak terduga sebesar 59.978.229.445, dan belanja transfer sebesar 668.319.977.231. Dari data tersebut dapat menggambarkan bahwa pada tahun 2021 belanja operasi daerah Kabupaten Tangerang lebih besar dari belanja modal yang diperuntukan bagi pembangunan daerah. Hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah. Karena pengelolaan APBD merupakan faktor kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan perubahan ekonomi, sosial budaya dan juga lingkungan yang ada di daerah ke arah yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 diketahui bahwa masih adanya 4 permasalahan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang. 4 kelompok tersebut yaitu permasalahan pada pengembangan sumber daya manusia, permasalahan ekonomi, permasalahan tata kelola pemerintahan dan permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Dengan latar belakang masalah di atas dan melihat potensi sumber pendapatan daerah Kabupaten Tangerang dalam mengelola pembangunan daerah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2021”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah.
2. Pada tahun 2021 belanja operasi Kabupaten Tangerang masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal.
3. Masih adanya 4 permasalahan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang yaitu permasalahan pada pengembangan sumber daya manusia, permasalahan ekonomi, permasalahan tata kelola pemerintahan, serta permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang mengenai kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan daerah.
- c. Bagi umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat luas dan dapat menjadi referensi bagi

penulis lainnya yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusannya. (Anggara, 2016:316) mengatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah menurut Undang-undang. Rumus yang digunakan dalam mengukur kemampuan keuangan pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi menurut (Halim, 2001:126-127) yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kedudukan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Pemerintah daerah perlu mengetahui sektor yang memiliki keunggulan dan kelemahan untuk dijadikan prioritas pembangunan daerah agar pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi optimal. Untuk mengetahui sektor unggulan, dalam penelitian ini menggunakan analisis relatif perekonomian

wilayah menurut Hirsman (Sundaro et al., 2021:4) yaitu analisis *location quotient*, analisis *Typologi Klassen* dan analisis *Shift Share*. Di bawah ini merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

